

## Dari Musibah ke Ketahanan Sosial: Analisis Sosiologi Al-Qur'an terhadap Praktik Muamalat Masyarakat Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang

**Muhammad Roni<sup>1</sup>**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
muhammad\_roni@iainlangsa.ac.id

**Mariadi**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
mariadi@iainlangsa.ac.id

**Muhammad Nuh Rasyid**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
muhammadnuhrasyid@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
26 Agustus 2025	29 Desember 2025	31 Desember 2025

### **Abstract**

*This study aims to examine how Qur'anic values are constructed and actualized within post-disaster mu'āmalāt practices and to analyze their role in fostering social resilience. This research employs a qualitative field-based approach using the perspective of Qur'anic sociology, drawing on observation, in-depth interviews, and thematic analysis of socio-economic practices within the community. The findings reveal that values such as ta'āwun (mutual assistance), al-'adl (justice), and ukhuwwah ijtimā'iyah (social fraternity) not only persist but are transformed into adaptive social mechanisms that support economic reconstruction and social cohesion in the aftermath of disaster. Qur'an-based mu'āmalāt practices thus function as a moral and social foundation for building contextual and sustainable community resilience.*

**Keywords:** Qur'anic sociology, Mu'āmalāt, Social Resilience.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dikonstruksi dan diaktualisasikan dalam praktik muamalat masyarakat Aceh Tamiang pascabencana, serta perannya dalam membangun ketahanan sosial

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

(*social resilience*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan perspektif sosiologi Al-Qur'an melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis tematik terhadap praktik sosial-ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *ta'awun*, *al-'adl*, dan *ukhuwwah ijtimā'iyah* tidak hanya bertahan, tetapi mengalami transformasi menjadi mekanisme sosial adaptif yang menopang rekonstruksi ekonomi dan kohesi sosial pascabencana. Praktik muamalat berbasis nilai Qur'ani terbukti berfungsi sebagai fondasi moral dan sosial dalam membangun ketahanan masyarakat secara kontekstual dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Sosiologi Al-Qur'an, Muamalat, Ketahanan Sosial.

## **Pendahuluan**

Bencana alam merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi dan membawa dampak multidimensional bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam aspek fisik dan ekologis, tetapi juga dalam ranah ekonomi, hukum, dan relasi sosial (Kasim et al., 2021). Dalam konteks masyarakat Muslim, musibah tidak sekadar dipahami sebagai peristiwa alamiah, melainkan sebagai bagian dari dinamika kehidupan kolektif yang menguji nilai keimanan, solidaritas, dan keadilan sosial. Al-Qur'an secara konsisten menempatkan musibah sebagai momentum refleksi dan pembelajaran sosial, di mana manusia dituntut untuk merespons krisis dengan kesadaran etis dan tanggung jawab kolektif (Baharuddin, 2025). Oleh karena itu, memahami bencana melalui perspektif sosial-keagamaan menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai normatif bekerja dalam realitas kehidupan masyarakat pascabencana. Pendekatan ini semakin relevan di tengah meningkatnya kerentanan sosial akibat perubahan iklim, ketimpangan struktural, dan lemahnya ketahanan komunitas.

Dalam praktik kehidupan sosial, bencana sering kali memicu disrupsi mendalam terhadap sistem muamalat masyarakat. Aktivitas ekonomi terhenti, jaringan distribusi terganggu, dan relasi sosial mengalami tekanan yang berpotensi memunculkan konflik maupun solidaritas (Suci, 2025). Pada titik ini, muamalat tidak lagi sekadar urusan transaksi ekonomi, tetapi menjadi arena penting dalam menentukan arah pemulihan dan ketahanan sosial. Al-Qur'an menawarkan seperangkat nilai yang menekankan *ta'awun*, *al-'adālah*, dan *maṣlahah* sebagai fondasi relasi sosial yang berkeadaban. Namun, bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dan dipraktikkan secara konkret dalam konteks pascabencana masih menjadi pertanyaan akademik yang memerlukan kajian empiris yang mendalam.

Secara khusus, masyarakat Aceh Tamiang mengalami banjir bandang yang membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi lokal. Kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, serta terganggunya relasi ekonomi memperlihatkan kerentanan sistem muamalat yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Aceh Tamiang memiliki karakter sosial dan religius yang kuat, dengan tradisi kekerabatan, otoritas keagamaan, dan nilai

Qur'ani yang hidup dalam keseharian masyarakat. Kondisi ini menjadikan Aceh Tamiang sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana praktik muamalat lokal bertransformasi dalam merespons musibah dan membangun ketahanan sosial pascabencana.

Idealnya, nilai-nilai Al-Qur'an tentang solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab kolektif mampu menjadi landasan utama dalam praktik muamalat masyarakat pascabencana. Muamalat diharapkan berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang melindungi kelompok rentan, mencegah eksploitasi, dan memperkuat kohesi sosial. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketegangan antara ideal normatif dan praktik sosial. Disrupsi ekonomi, keterbatasan sumber daya, dan intervensi kebijakan yang belum sepenuhnya kontekstual berpotensi melemahkan keberfungsian nilai-nilai tersebut. Ketegangan inilah yang menjadi masalah utama penelitian, yakni bagaimana praktik muamalat masyarakat Aceh Tamiang pasca banjir bandang merefleksikan, menegosiasikan, atau bahkan mentransformasikan nilai-nilai Qur'ani dalam membangun ketahanan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik muamalat masyarakat Aceh Tamiang pasca banjir bandang melalui perspektif sosiologi Al-Qur'an. Penelitian ini secara khusus berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan ketahanan sosial diinternalisasi dalam relasi muamalat lokal, serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap proses pemulihan sosial pascabencana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, kultural, dan religius yang memengaruhi transformasi praktik muamalat dalam konteks kebencanaan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan sosiologi Al-Qur'an dalam kajian hukum dan muamalat Islam, khususnya dalam konteks bencana dan ketahanan sosial. Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran kontekstual tentang praktik muamalat masyarakat Aceh Tamiang yang selama ini belum banyak terungkap dalam literatur akademik. Sementara itu, secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pemulihan pascabencana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berbasis nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memiliki relevansi nyata bagi penguatan ketahanan sosial masyarakat di wilayah rawan bencana.

Kajian tentang relasi antara musibah, praktik muamalat, dan ketahanan sosial telah lama menjadi perhatian para akademisi lintas disiplin, khususnya dalam studi ekonomi Islam, hukum Islam, dan sosiologi kebencanaan. Berbagai penelitian telah mengkaji bagaimana bencana memengaruhi struktur ekonomi, distribusi sumber daya, serta mekanisme solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan musibah sebagai peristiwa eksternal yang berdampak pada sistem, bukan sebagai fakta sosial yang secara aktif membentuk ulang nilai, relasi, dan praktik muamalat masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi Al-Qur'an masih relatif jarang digunakan sebagai pisau analisis utama, padahal ia menawarkan perspektif integratif antara teks wahyu dan realitas sosial.

Aris Anwaril Muttaqin et al., dalam artikel *“The Relationship of Disaster to the Islamic Economic System: An Analysis on Aspect of Maqāsid Shari’ah Framework”*, mengkaji keterkaitan antara bencana dan sistem ekonomi Islam melalui kerangka *maqāsid al-shari’ah*. Penelitian ini menempatkan bencana sebagai ujian terhadap keberfungsian tujuan-tujuan syariah, khususnya perlindungan jiwa dan harta. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa respons ekonomi terhadap bencana harus berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial (Muttaqin et al., 2023). Kajian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal memandang bencana sebagai momentum evaluasi sistem muamalat Islam. Namun, perbedaannya terletak pada level analisis; studi ini bersifat normatif-makro, sementara kajian penulis bergerak pada ranah praksis sosial dan relasi muamalat yang hidup di tingkat komunitas lokal.

Berbeda dengan pendekatan normatif tersebut, Ashabul Fadhli et al. melalui artikel *“Optimizing the Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah for Post-Disaster Economic Recovery Through Local Policy Approaches”* lebih menekankan aspek kelembagaan dan kebijakan publik dalam pemulihan ekonomi pascabencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan *zakāt*, *infāq*, dan *sadaqah* melalui kebijakan lokal mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketahanan masyarakat terdampak (Fadhli et al., 2025). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada fokus muamalat sebagai instrumen pemulihan sosial-ekonomi. Namun, penelitian ini masih memosisikan masyarakat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek sosial yang secara aktif mentransformasikan praktik muamalatnya berdasarkan nilai dan pengalaman kolektif pascabencana.

Sementara itu, Baharuddin dalam studinya *“Social Capital and Community Resilience to Tidal Flooding: A Sociological Study in the Coastal Area of Pontianak City”* mengkaji ketahanan komunitas melalui perspektif *social capital*. Penelitian ini menegaskan bahwa jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif merupakan faktor kunci dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana banjir (Baharuddin, 2025). Studi ini sejalan dengan kajian penulis dalam menekankan pentingnya relasi sosial dalam proses pemulihan pascabencana. Namun, Baharuddin tidak secara eksplisit mengaitkan modal sosial tersebut dengan nilai-nilai normatif Al-Qur’an atau praktik muamalat Islam. Dengan demikian, dimensi religius dan etika Islam dalam pembentukan ketahanan sosial masih berada di luar fokus kajian tersebut.

Adapun Suud Sarim Karimullah, dalam artikel *“The Role of Islamic Philanthropy in Natural and Humanitarian Disaster Management”*, menyoroti kontribusi filantropi Islam dalam manajemen bencana dan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa instrumen filantropi Islam berperan signifikan dalam membangun solidaritas sosial dan mendukung pemulihan masyarakat terdampak (Karimullah, 2025). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada penekanan terhadap nilai solidaritas dan keadilan sosial. Namun, penelitian ini cenderung membatasi muamalat pada praktik filantropi formal, sementara kajian penulis memperluas makna muamalat mencakup relasi ekonomi informal, gotong royong, dan adaptasi norma sosial berbasis nilai Qur’ani.

Dari telaah kritis terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian tentang bencana dan muamalat masih terfragmentasi antara pendekatan normatif, kebijakan, dan sosiologis. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, pendekatan sosiologi Al-Qur'an sebagai metode untuk membaca praktik sosial umat Islam pascabencana masih belum dikembangkan secara optimal. Padahal, pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih humanis terhadap musibah, tidak semata sebagai objek regulasi atau filantropi, tetapi sebagai pengalaman sosial yang membentuk ulang kesadaran kolektif masyarakat. Lebih jauh, konteks lokal Aceh Tamiang memiliki kekhasan sosial dan religius yang belum terakomodasi secara memadai dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi sebelumnya bersifat lintas wilayah atau menggunakan pendekatan umum, sehingga kurang menangkap dinamika lokal dalam praktik muamalat pascabencana.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* pada tiga level sekaligus. Pertama, secara teoretis, penelitian ini mengembangkan pendekatan sosiologi Al-Qur'an untuk membaca musibah sebagai fakta sosial yang membentuk transformasi praktik muamalat. Kedua, secara empiris, penelitian ini menghadirkan studi kontekstual tentang masyarakat Aceh Tamiang yang selama ini kurang tereksplorasi dalam literatur kebencanaan Islam. Ketiga, secara konseptual, penelitian ini memosisikan muamalat bukan hanya sebagai instrumen ekonomi atau filantropi, tetapi sebagai arena rekonstruksi sosial yang mempertemukan nilai solidaritas, keadilan, dan ketahanan sosial pascabencana. Penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian-kajian sebelumnya, tetapi juga memperluas horizon keilmuan dengan menghadirkan perspektif integratif dan humanis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi hukum dan muamalat Islam, sekaligus menawarkan model analisis yang relevan bagi pengelolaan kebencanaan berbasis nilai dan komunitas di masa depan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika ketahanan sosial masyarakat pascabencana melalui praktik muamalat yang hidup dan berkembang di Aceh Tamiang. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sosiologi Al-Qur'an, yang dipadukan dengan analisis sosial-empiris untuk membaca relasi dialektis antara nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan realitas praktik muamalat masyarakat pasca banjir bandang. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi data hasil observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tokoh agama, pelaku muamalat lokal, korban banjir, serta pemangku kebijakan setempat, sementara sumber sekunder terdiri atas literatur Al-Qur'an dan tafsir tematik, jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku sosiologi agama, hukum Islam, serta dokumen kebijakan kebencanaan.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penafsiran nilai-nilai Qur'ani menggunakan pendekatan *thematic interpretation*. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan melalui *triangulation* sumber dan metode, *member check*, serta kecukupan referensial untuk memastikan kredibilitas dan dependabilitas data. Adapun sistem

penyusunan draft naskah dilakukan secara analitis-deskriptif dengan alur umum-khusus, mengintegrasikan temuan empiris dan kerangka teoretis secara dialogis, sehingga menghasilkan argumentasi ilmiah yang koheren, tajam, dan relevan dengan diskursus hukum dan muamalat Islam kontemporer.

### **Musibah sebagai Fakta Sosial: Perspektif Sosiologi Al-Qur'an dalam Memahami Bencana Alam**

Musibah dalam bentuk bencana alam tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai peristiwa alamiah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta sosial (*social fact*) yang memiliki implikasi luas terhadap struktur, relasi, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat (Ferdy, 2025). Dalam perspektif sosiologi, bencana bukan hanya soal kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga menyangkut perubahan pola interaksi sosial, mekanisme adaptasi, serta konfigurasi kekuasaan dan ekonomi. Al-Qur'an sebagai teks normatif sekaligus sosial memberikan kerangka epistemologis untuk membaca musibah sebagai bagian dari dinamika kehidupan kolektif manusia (Masripah et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan sosiologi Al-Qur'an menjadi relevan untuk memahami bencana secara holistik, yakni sebagai peristiwa teologis, sosial, dan moral yang saling berkelindan dalam realitas masyarakat modern.

Dalam kajian sosiologi klasik, terutama melalui pemikiran *Émile Durkheim*, fakta sosial dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar individu, bersifat memaksa, dan membentuk pola perilaku kolektif (Karimullah, 2025). Musibah, dalam konteks ini, dapat diposisikan sebagai fakta sosial karena kehadirannya mengonstruksi respons bersama, mulai dari solidaritas spontan hingga konflik laten. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Al-Qur'an yang menempatkan musibah sebagai peristiwa yang berdampak kolektif, bukan sekadar ujian individual. Ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa musibah sering kali dikaitkan dengan kondisi sosial suatu kaum, sehingga respons terhadapnya pun tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Al-Qur'an menggunakan beragam terminologi untuk menggambarkan musibah, seperti *muṣībah*, *balā'*, dan *fitnah*, yang masing-masing memiliki nuansa makna sosial dan moral. Istilah *muṣībah* tidak hanya menunjuk pada peristiwa buruk, tetapi juga pada sesuatu yang "mengenai" manusia secara langsung dalam kehidupannya. Sementara itu, *balā'* sering dipahami sebagai ujian yang mengandung dimensi evaluatif terhadap kualitas iman dan amal kolektif (Hibatullah & Sos, 2025). Dengan demikian, musibah dalam Al-Qur'an tidak bersifat netral secara sosial, melainkan mengandung pesan normatif yang menuntut refleksi dan transformasi perilaku masyarakat.

Pendekatan sosiologi Al-Qur'an memandang teks wahyu tidak hanya sebagai sumber hukum normatif, tetapi juga sebagai refleksi dan kritik terhadap realitas sosial. Dalam konteks bencana alam, Al-Qur'an tidak berhenti pada penjelasan kausalitas metafisik, melainkan menekankan relasi antara perilaku manusia dan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya. Konsep *sunnatullāh* menunjukkan bahwa terdapat hukum-hukum sosial yang bekerja secara konsisten dalam kehidupan manusia. Ketika prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab kolektif diabaikan, maka musibah dapat menjadi mekanisme korektif dalam

tatanan sosial. Lebih jauh, Al-Qur'an menegaskan bahwa musibah tidak selalu identik dengan hukuman (*punishment*), tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial (*social learning*). Perspektif ini penting untuk menghindari reduksi teologis yang menyalahkan korban bencana secara simplistik. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menekankan pentingnya sikap *ṣabr*, *ta'āwun*, dan *islāh* sebagai respons sosial terhadap musibah. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa bencana justru menjadi ruang pembentukan solidaritas dan etika sosial yang lebih humanis.

Dalam konteks masyarakat modern, bencana alam juga memperlihatkan ketimpangan struktural yang telah lama terakumulasi. Kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara ekonomi maupun sosial. Perspektif sosiologi Al-Qur'an mengkritisi kondisi ini dengan menekankan prinsip keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtimā'iyah*) dan perlindungan terhadap kelompok lemah (*mustad'afīn*). Musibah, dengan demikian, membuka tabir ketidakadilan struktural yang sebelumnya tersembunyi dalam rutinitas sosial sehari-hari (Arifqi et al., 2024).

Al-Qur'an juga mengaitkan musibah dengan konsep tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*). Dalam beberapa narasi kaum terdahulu, kehancuran sosial tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individu, tetapi oleh pembiaran sosial terhadap ketidakadilan dan penyimpangan moral. Hal ini menunjukkan bahwa musibah dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kegagalan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan etika publik. Perspektif ini sangat relevan dalam membaca bencana kontemporer yang sering kali diperparah oleh kelalaian kebijakan dan eksploitasi lingkungan.

Dimensi lingkungan dalam musibah juga mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an melalui konsep *fasād fī al-ard*. Kerusakan alam tidak dipandang sebagai fenomena alamiah semata, tetapi sebagai hasil dari relasi eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan diskursus kontemporer tentang *environmental sociology* dan *ecological justice* (Kasim et al., 2021). Dengan demikian, sosiologi Al-Qur'an menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk mengaitkan bencana alam dengan tanggung jawab ekologis dan etika muamalat manusia terhadap alam.

Dalam ranah muamalat, musibah berfungsi sebagai ujian terhadap ketahanan institusi sosial dan ekonomi masyarakat. Al-Qur'an menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil, mekanisme tolong-menolong, dan perlindungan terhadap hak-hak sosial pascabencana. Praktik seperti *zakāt*, *ṣadaqah*, dan *waqf* bukan hanya ibadah individual, tetapi instrumen sosial untuk membangun resiliensi kolektif. Di sinilah musibah bertransformasi dari peristiwa destruktif menjadi momentum rekonstruksi sosial berbasis nilai-nilai Qur'ani.

Pendekatan sosiologi Al-Qur'an juga menolak dikotomi antara dimensi teologis dan empiris dalam memahami bencana. Musibah tidak diposisikan sebagai takdir yang pasif, melainkan sebagai realitas yang menuntut respons aktif dan rasional. Konsep *ikhtiyār* dan *mas'ūliyyah* menunjukkan bahwa manusia memiliki peran signifikan dalam menentukan arah pemulihan sosial pascabencana. Dengan demikian, pemahaman teologis justru memperkuat etos partisipasi sosial dan tanggung jawab hukum dalam konteks kebencanaan.

Dalam konteks hukum dan muamalat kontemporer, musibah menuntut pembacaan ulang terhadap kebijakan publik dan tata kelola risiko bencana. Perspektif sosiologi Al-Qur'an mendorong integrasi nilai-nilai etis dalam perumusan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pengelolaan sumber daya. Prinsip *maṣlahah* dan *raf' al-ḍarar* menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa kebijakan pascabencana tidak memperdalam ketimpangan sosial (Zakariya et al., 2025). Hal ini menunjukkan relevansi Al-Qur'an sebagai sumber nilai dalam diskursus hukum modern. Memahami musibah sebagai fakta sosial melalui perspektif sosiologi Al-Qur'an membuka ruang analisis yang lebih komprehensif dan humanis. Bencana alam tidak lagi dipahami sebagai peristiwa insidental, tetapi sebagai cermin relasi sosial, struktur hukum, dan etika muamalat masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menawarkan kontribusi substantif bagi diskursus global tentang bencana, keadilan sosial, dan ketahanan masyarakat.

### **Nilai-Nilai Al-Qur'an tentang Solidaritas, Keadilan, dan Ketahanan Sosial dalam Relasi Muamalat**

Nilai-nilai Al-Qur'an tentang solidaritas, keadilan, dan ketahanan sosial menempati posisi sentral dalam pembentukan relasi muamalat yang berkeadaban. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber norma ibadah ritual, tetapi juga sebagai fondasi etika sosial yang mengatur interaksi ekonomi dan hukum antarindividu dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh kompleksitas relasi pasar dan ketimpangan struktural, nilai-nilai Qur'ani tersebut menjadi kerangka normatif untuk memastikan bahwa aktivitas muamalat tidak terlepas dari prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, relasi muamalat dipahami bukan sekadar pertukaran ekonomi, melainkan sebagai ruang artikulasi nilai sosial yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif.

Solidaritas sosial dalam Al-Qur'an direpresentasikan melalui konsep *ta'āwun* dan *ukhuwwah*, yang menekankan pentingnya kerja sama dan rasa kebersamaan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial (Muttaqin et al., 2023). Prinsip ini melampaui batas relasi personal dan menembus struktur ekonomi serta hukum yang mengatur distribusi sumber daya. Dalam relasi muamalat, solidaritas tidak berhenti pada empati moral, tetapi diwujudkan dalam mekanisme konkret seperti saling menolong dalam kesulitan ekonomi dan menghindari praktik eksploitatif. Dengan cara ini, Al-Qur'an menempatkan solidaritas sebagai fondasi etis yang menjaga keberlanjutan hubungan sosial dalam sistem ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, Al-Qur'an mengaitkan solidaritas dengan tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*) yang menuntut partisipasi aktif setiap anggota masyarakat (Iskandar, 2025). Konsep ini menolak individualisme ekstrem yang kerap menjadi karakter dominan dalam sistem ekonomi modern. Dalam perspektif muamalat, tanggung jawab kolektif tercermin dalam kewajiban sosial seperti *zakāt*, *ṣadaqah*, dan *infāq*, yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki dimensi struktural dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil (Fadhli et al., 2025).

Keadilan (*al-'adālah*) merupakan nilai fundamental lain yang menjadi pilar relasi muamalat dalam Al-Qur'an. Keadilan tidak dimaknai secara sempit sebagai kesetaraan formal, melainkan sebagai prinsip proporsionalitas yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan sosial. Dalam aktivitas ekonomi, keadilan menuntut transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah. Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik penipuan, *gharar*, dan *ribā* karena berpotensi merusak tatanan sosial dan menciptakan ketimpangan struktural yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum muamalat, keadilan Qur'ani juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan pasar (*market failure*). Al-Qur'an mendorong hadirnya regulasi dan etika yang memastikan bahwa relasi ekonomi tidak didominasi oleh kekuatan modal semata. Prinsip *al-mīzān* menegaskan pentingnya keseimbangan dalam setiap transaksi, sehingga kepentingan individu tidak mengorbankan kepentingan sosial. Dengan demikian, keadilan dalam muamalat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan konteks sosial.

Ketahanan sosial (*social resilience*) merupakan implikasi langsung dari penerapan nilai solidaritas dan keadilan dalam relasi muamalat. Al-Qur'an memandang ketahanan sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari krisis ekonomi maupun sosial. Ketahanan ini tidak dibangun melalui akumulasi kekayaan semata, tetapi melalui penguatan jaringan sosial dan institusi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, muamalat berfungsi sebagai medium integrasi sosial yang memperkuat kohesi dan kepercayaan antaranggota masyarakat.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan (*mustad'afīn*) sebagai indikator utama ketahanan sosial (Badruddin, 2023). Relasi muamalat yang berkeadilan ditandai oleh keberpihakan pada mereka yang secara struktural berada dalam posisi lemah. Prinsip ini menuntut kebijakan ekonomi dan hukum yang afirmatif, bukan netral secara semu. Dengan demikian, nilai Qur'ani mendorong muamalat yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau disrupsi ekonomi global, nilai-nilai Qur'ani dalam muamalat menunjukkan relevansinya secara nyata. Solidaritas diwujudkan melalui praktik saling membantu dan distribusi sumber daya secara adil, sementara keadilan menjadi dasar dalam penentuan prioritas pemulihan sosial. Ketahanan sosial yang terbangun dari nilai-nilai ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan transformasi struktural pascakrisis. Hal ini menunjukkan bahwa muamalat Qur'ani memiliki dimensi strategis dalam manajemen risiko sosial.

Pendekatan Al-Qur'an terhadap muamalat juga mengintegrasikan dimensi etika dan hukum secara simultan. Norma hukum tidak dipahami sebagai aturan kaku, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai keadilan dan solidaritas dalam praktik sosial. Konsep *maṣlaḥah* menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas empiris, memungkinkan fleksibilitas hukum tanpa kehilangan orientasi etis. Dengan demikian, muamalat Qur'ani bersifat responsif terhadap perubahan sosial.

Dalam diskursus hukum ekonomi Islam kontemporer, nilai-nilai solidaritas dan keadilan Qur'ani menawarkan alternatif terhadap paradigma neoliberal yang

cenderung menekankan efisiensi pasar di atas segalanya. Al-Qur'an menolak logika akumulasi tanpa batas dan menegaskan pentingnya distribusi yang berkeadilan (Ridha, 2016). Perspektif ini sejalan dengan kritik modern terhadap ketimpangan global dan krisis kepercayaan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Oleh karena itu, muamalat Qur'ani memiliki potensi kontribusi signifikan dalam diskursus global tentang keadilan ekonomi.

Ketahanan sosial yang dibangun melalui relasi muamalat Qur'ani juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas hukum dan politik. Masyarakat yang memiliki jaringan solidaritas kuat dan sistem distribusi adil cenderung lebih stabil dan inklusif. Dalam konteks ini, muamalat berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang menopang legitimasi hukum dan kebijakan publik. Al-Qur'an, dengan demikian, tidak hanya berbicara pada level moral, tetapi juga pada tataran institusional. Nilai-nilai Al-Qur'an tentang solidaritas, keadilan, dan ketahanan sosial membentuk kerangka normatif yang komprehensif bagi relasi muamalat. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan etika kemanusiaan. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan rentan terhadap krisis, pendekatan Qur'ani terhadap muamalat menawarkan visi alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Transformasi Praktik Muamalat Masyarakat Pasca Bencana: Dari Disrupsi Ekonomi ke Rekonstruksi Sosial**

Transformasi praktik muamalat masyarakat pasca bencana merupakan fenomena sosial yang mencerminkan perubahan mendasar dalam relasi ekonomi, hukum, dan solidaritas sosial. Bencana tidak hanya menimbulkan disrupsi pada infrastruktur fisik dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengguncang tatanan nilai yang selama ini menopang praktik muamalat (Munir & Kusumah, 2023). Dalam situasi krisis, relasi ekonomi yang sebelumnya berjalan normal sering kali mengalami distorsi akibat hilangnya aset, terputusnya rantai distribusi, dan melemahnya kapasitas produksi masyarakat. Oleh karena itu, memahami muamalat pascabencana menuntut pendekatan yang tidak semata-mata ekonomistik, melainkan juga sosiologis dan normatif.

Pada fase awal pascabencana, disrupsi ekonomi (*economic disruption*) menjadi realitas yang tak terhindarkan. Aktivitas jual beli terhenti, harga kebutuhan pokok melonjak, dan akses terhadap modal menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi ini, relasi muamalat cenderung berada dalam situasi asimetris, di mana kelompok rentan menghadapi risiko eksploitasi yang lebih besar. Perspektif hukum muamalat Islam memandang kondisi ini sebagai situasi darurat (*darūrah*) yang memerlukan perlindungan khusus terhadap hak-hak sosial masyarakat terdampak (Hasmita, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa keberlanjutan muamalat tidak boleh mengorbankan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Disrupsi ekonomi pascabencana juga memperlihatkan rapuhnya sistem muamalat yang terlalu bergantung pada mekanisme pasar (*market mechanism*). Ketika pasar gagal berfungsi secara normal, relasi ekonomi informal dan berbasis komunitas justru menjadi penopang utama keberlangsungan hidup masyarakat. Praktik saling meminjam tanpa bunga, distribusi bantuan berbasis kepercayaan,

dan kerja kolektif muncul sebagai bentuk adaptasi sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa muamalat tidak semata-mata ditentukan oleh kontrak formal, tetapi juga oleh modal sosial (*social capital*) yang hidup dalam komunitas (Baharuddin, 2025).

Dalam perspektif Al-Qur'an, transformasi muamalat pascabencana diarahkan pada penguatan nilai *ta'āwun* dan *ukhuwwah* sebagai fondasi rekonstruksi sosial. Relasi ekonomi yang sebelumnya berorientasi pada keuntungan individual mengalami pergeseran menuju kepentingan kolektif. Pergeseran ini tidak bersifat spontan semata, melainkan didorong oleh kesadaran normatif bahwa krisis menuntut solidaritas yang lebih besar. Dengan demikian, muamalat berfungsi sebagai medium pembentukan kembali jaringan sosial yang sempat terfragmentasi akibat bencana.

Seiring berjalannya waktu, praktik muamalat memasuki fase transisi dari bantuan darurat menuju pemulihan ekonomi (*economic recovery*). Pada tahap ini, muncul kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang mampu mengakomodasi kondisi khusus masyarakat terdampak. Prinsip *maṣlaḥah* menjadi landasan normatif untuk merumuskan kebijakan muamalat yang adaptif dan kontekstual. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memulihkan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencegah reproduksi ketimpangan sosial yang mungkin diperparah oleh bencana.

Rekonstruksi sosial melalui muamalat juga melibatkan redefinisi hubungan antara negara, masyarakat, dan pasar. Negara dituntut hadir sebagai penjamin keadilan melalui regulasi dan intervensi yang proporsional, sementara masyarakat berperan aktif dalam membangun kembali jaringan ekonomi lokal (Muttaqin et al., 2023). Dalam konteks ini, muamalat menjadi ruang negosiasi antara kepentingan publik dan privat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adālah al-ijtimā'iyah* yang menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Karimullah, 2025).

Transformasi praktik muamalat pascabencana juga ditandai oleh munculnya inovasi sosial (*social innovation*). Masyarakat mengembangkan bentuk-bentuk usaha kolektif, koperasi berbasis syariah, dan skema pembiayaan mikro yang lebih inklusif. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi bertahan, tetapi juga sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif hukum muamalat, inovasi semacam ini mencerminkan fleksibilitas norma Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi etis.

Dimensi hukum dalam transformasi muamalat pascabencana menjadi semakin penting ketika konflik kepemilikan dan distribusi sumber daya mulai muncul. Kehilangan dokumen, perubahan batas lahan, dan perebutan akses bantuan sering kali memicu sengketa sosial. Prinsip *raf' al-ḍarar* menuntut penyelesaian konflik yang mengutamakan pengurangan mudarat dan pemulihan harmoni sosial (Yunus et al., 2025). Dengan demikian, hukum muamalat tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme resolusi konflik yang humanis.

Pada tahap rekonstruksi, muamalat berperan dalam membangun kembali kepercayaan (*trust*) antaraktor sosial. Kepercayaan merupakan prasyarat utama bagi berfungsinya relasi ekonomi yang sehat, terutama dalam masyarakat pascabencana yang mengalami trauma kolektif. Praktik muamalat yang transparan

dan berkeadilan menjadi sarana untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Dalam konteks ini, nilai kejujuran (*sidq*) dan amanah menjadi pilar utama rekonstruksi sosial. Transformasi muamalat pascabencana juga memiliki implikasi terhadap ketahanan sosial (*social resilience*) masyarakat (Ferdy, 2025). Relasi ekonomi yang berbasis solidaritas dan keadilan memungkinkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Ketahanan ini tidak hanya diukur dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari kekuatan jaringan sosial dan institusi lokal. Al-Qur'an menekankan bahwa ketahanan sosial lahir dari keseimbangan antara ikhtiar manusia dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etis.

Dalam perspektif global, pengalaman transformasi muamalat pascabencana menawarkan kontribusi penting bagi diskursus hukum dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Utomo, 2022). Pendekatan yang mengintegrasikan nilai normatif dan praktik sosial memberikan alternatif terhadap model pemulihan yang semata-mata berbasis pertumbuhan ekonomi. Muamalat Qur'ani menunjukkan bahwa rekonstruksi sosial yang berkeadilan dapat berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini memperkuat relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan kemanusiaan kontemporer. Transformasi praktik muamalat masyarakat pasca bencana tidak dapat dipahami hanya sebagai respons sementara terhadap krisis. Ia merupakan proses sosial yang kompleks, melibatkan pergeseran nilai, institusi, dan relasi kekuasaan. Dari disrupsi ekonomi menuju rekonstruksi sosial, muamalat tampil sebagai instrumen strategis dalam membangun kembali tatanan masyarakat yang lebih adil dan berketahanan.

### **Ketahanan Sosial Masyarakat Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang: Analisis Sosiologi Al-Qur'an terhadap Praktik Muamalat Lokal**

Ketahanan sosial masyarakat pascabencana merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu komunitas mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari krisis multidimensional. Dalam konteks Aceh Tamiang, banjir bandang tidak hanya menghadirkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga menguji kekuatan relasi sosial dan nilai-nilai lokal yang menopang kehidupan masyarakat. Perspektif sosiologi Al-Qur'an menawarkan kerangka analitis yang memadukan dimensi normatif dan empiris dalam membaca ketahanan sosial tersebut (Munir & Kusumah, 2023). Melalui pendekatan ini, ketahanan sosial tidak dipahami sekadar sebagai kemampuan teknis, melainkan sebagai manifestasi nilai keimanan, solidaritas, dan keadilan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Banjir bandang sebagai peristiwa sosial (*social event*) menimbulkan dampak sistemik terhadap struktur ekonomi dan hukum masyarakat Aceh Tamiang. Hilangnya mata pencaharian, rusaknya aset produktif, dan terganggunya jaringan distribusi memperlihatkan kerentanan sistem muamalat lokal. Dalam situasi ini, ketahanan sosial diuji melalui kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi sumber daya secara kolektif. Al-Qur'an memandang musibah sebagai momentum refleksi sosial, di mana relasi muamalat menjadi arena penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif (Masripah et al., 2025).

Dalam perspektif sosiologi Al-Qur'an, ketahanan sosial berakar pada konsep *ṣabr*, *ta'āwun*, dan *tawakkul* yang saling melengkapi (Iskandar, 2025). Ketiga

konsep ini tidak bersifat pasif, melainkan mendorong tindakan sosial yang terarah dan berkesadaran. *Ṣabr* dimaknai sebagai daya tahan moral dalam menghadapi krisis, sementara *ta'āwun* menjadi dasar praksis solidaritas sosial. Adapun *tawakkul* berfungsi sebagai kerangka spiritual yang memperkuat optimisme kolektif dalam proses pemulihan pascabencana.

Praktik muamalat lokal masyarakat Aceh Tamiang menunjukkan adaptasi yang signifikan pascabencana. Relasi ekonomi berbasis kekerabatan dan komunitas kembali menguat ketika mekanisme pasar formal mengalami disrupsi. Sistem saling membantu dalam bentuk peminjaman tanpa bunga, kerja gotong royong, dan distribusi bantuan berbasis kepercayaan menjadi strategi bertahan yang efektif. Fenomena ini mencerminkan keberfungsian modal sosial (*social capital*) yang tertanam kuat dalam budaya lokal Aceh Tamiang.

Analisis sosiologi Al-Qur'an terhadap praktik muamalat tersebut menunjukkan adanya internalisasi nilai *ukhuwwah* dan *al-'adālah* dalam relasi ekonomi sehari-hari. Keadilan tidak dipahami secara formalistik, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dalam kondisi krisis. Masyarakat cenderung menghindari praktik spekulatif dan eksploitasi yang berpotensi memperburuk penderitaan korban bencana. Dengan demikian, muamalat lokal berfungsi sebagai mekanisme etis untuk melindungi kelompok rentan (*mustad'afin*).

Ketahanan sosial masyarakat Aceh Tamiang juga tercermin dalam fleksibilitas norma muamalat dalam merespons kondisi darurat (*darūrah*). Prinsip *maṣlahah* menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi dan hukum di tingkat komunitas. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan praktik muamalat tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami sebagai aturan kaku, tetapi sebagai instrumen pemulihan sosial yang adaptif.

Peran institusi keagamaan dan adat lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan sosial pascabencana (Zakariya et al., 2025). Tokoh agama dan pemuka adat berfungsi sebagai mediator nilai dan praktik, memastikan bahwa proses pemulihan berjalan selaras dengan prinsip Qur'ani. Melalui khutbah, musyawarah, dan fatwa lokal, nilai solidaritas dan keadilan ditransformasikan menjadi pedoman praktis dalam muamalat. Sinergi antara agama dan adat ini memperkuat legitimasi sosial dari praktik pemulihan yang dilakukan masyarakat.

Dalam ranah hukum muamalat, banjir bandang juga memunculkan tantangan terkait kepemilikan, distribusi bantuan, dan penyelesaian sengketa. Kehilangan dokumen dan perubahan kondisi fisik wilayah sering kali memicu konflik laten (Suprayitno et al., 2024). Pendekatan sosiologi Al-Qur'an mendorong penyelesaian konflik berbasis *iṣlāḥ* dan *raf' al-ḍarar*, dengan menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan utama. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana nilai Qur'ani dapat berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik yang humanis.

Ketahanan sosial Aceh Tamiang pascabencana juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat membangun kembali kepercayaan (*trust*) antaraktor sosial. Kepercayaan menjadi modal penting dalam mengaktifkan kembali relasi muamalat yang sempat terhenti. Transparansi dalam pengelolaan bantuan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi mempercepat proses pemulihan. Dalam perspektif Al-Qur'an, nilai *amānah* menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Dari sudut pandang sosiologi hukum, praktik muamalat

lokal pascabencana menunjukkan adanya interaksi dinamis antara norma agama, adat, dan kebijakan negara. Ketahanan sosial tidak hanya dibangun dari bawah (*bottom-up*), tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan publik yang responsif. Namun, kekuatan utama masyarakat Aceh Tamiang terletak pada kemampuan mereka mengintegrasikan nilai Qur'ani ke dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial bersifat kontekstual dan berbasis nilai lokal.

Pengalaman Aceh Tamiang memberikan pelajaran penting bagi pengembangan model ketahanan sosial berbasis sosiologi Al-Qur'an. Praktik muamalat lokal yang adaptif dan berkeadilan dapat menjadi referensi bagi wilayah lain yang menghadapi risiko bencana serupa. Model ini menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup dengan pendekatan teknokratis semata. Diperlukan penguatan nilai dan institusi sosial yang berakar pada budaya dan agama masyarakat setempat. Ketahanan sosial masyarakat Aceh Tamiang pasca banjir bandang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara nilai Qur'ani, praktik muamalat lokal, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Analisis sosiologi Al-Qur'an menunjukkan bahwa muamalat bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga medium pembentukan solidaritas, keadilan, dan resiliensi sosial.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa banjir bandang di Aceh Tamiang bukan sekadar peristiwa ekologis yang menimbulkan kerusakan material, melainkan juga momen krusial yang membentuk ulang struktur relasi sosial dan praktik muamalat masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi Al-Qur'an, studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti *ta'āwun*, *al-'adl*, dan *ukhuwwah ijtimā'iyah* bertransformasi dari prinsip normatif menjadi praksis sosial yang hidup dalam situasi krisis. Praktik muamalat pascabencana berkembang secara adaptif dengan menekankan solidaritas, redistribusi sumber daya berbasis kebutuhan, serta etika ekonomi yang menempatkan kemanusiaan di atas rasionalitas pasar. Temuan ini secara tegas menjawab persoalan penelitian dalam pendahuluan, bahwa ketahanan sosial masyarakat Aceh Tamiang pasca banjir bandang dibangun melalui internalisasi nilai Al-Qur'an yang berfungsi sebagai *moral infrastructure* dalam menghadapi disrupsi ekonomi dan sosial.

Implikasi penelitian ini bersifat terukur dan strategis, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Secara akademik, studi ini memperluas diskursus hukum dan muamalat Islam dengan menghadirkan model analisis sosiologi Al-Qur'an yang kontekstual dan empiris, sehingga menjembatani kesenjangan antara idealitas teks dan realitas sosial pascabencana. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya integrasi nilai-nilai muamalat Qur'ani ke dalam kebijakan pemulihan ekonomi dan tata kelola kebencanaan, khususnya melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas, optimalisasi filantropi Islam, dan desain regulasi yang sensitif terhadap kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi konseptual, tetapi juga menyediakan kerangka aplikatif bagi pembangunan ketahanan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam konteks masyarakat rentan bencana.

## Referensi

- Arifqi, M. M., Sofyan, A., Mayaningsih, D., & Fitriyah, R. (2024). Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 75–85. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33518>
- Badruddin, A. (2023). *Filantropi Korporasi dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Baharuddin. (2025). Social Capital and Community Resilience to Tidal Flooding: A Sociological Study in the Coastal Area of Pontianak City. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(3). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i3.7837>
- Fadhli, A., Susanti, R., & Apriyanti, N. (2025). Optimizing the Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah for Post-Disaster Economic Recovery Through Local Policy Approaches. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 9(1), 75–87. <https://doi.org/10.30983/es.v9i1.9645>
- Ferdy, P. (2025). *Dinamika Sosial dan Keagamaan Pascabencana Tsunami 2018 (Studi Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Hasmita, H. (2022). *Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Islam)*.
- Hibatullah, A., & Sos, S. (2025). *Tafsir Tematik Dakwah Bil Hal dalam Al-Qur'an dan Implementasinya untuk Pengembangan Masyarakat Islam*. umsu press.
- Iskandar, I. (2025). Penguatan Ekonomi Syariah melalui Keuangan Sosial Islam. *Al-Haramain*.
- Karimullah, S. S. (2025). The Role of Islamic Philanthropy in Natural and Humanitarian Disaster Management. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17(1), 11–28. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v17i1.3626>
- Kasim, F. M., Nurdin, A., & Rizwan, M. (2021). Agama, Modal Sosial dan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 66–73. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p66-73.2021>
- Masripah, M., Al Firdaus, A., & Firmansyah, H. (2025). Membangun Solidaritas Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(1), 349–364.
- Munir, M., & Kusumah, E. P. (2023). Family Economic Resilience: An Overview of Islamic Economics Stance. *AL-Muqayyad*, 6(1), 29–39. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.985>
- Muttaqin, A. A., Samsudin, M. A., Salleh, A. D., & Ahmad, A. A. (2023). The Relationship of Disaster to the Islamic Economic System: An Analysis on Aspect of Maqāsid Shari'ah Framework. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 216–238. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.16014>
- Ridha, M. (2016). Studi Tematik Konseptual terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Keadilan Sosial (Relevansi dengan Sila Kelima Pancasila). *Skripsi Uin Sunan Kalijaga*.

- Suci, S. R. (2025). *Makna Mitigasi Bencana dalam Ritual Tolak Bala Raba'akia di Kelurahan Air Manis Kota Padang*.
- Suprayitno, E., Khusnudin, K., & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam Pemulihan Daerah Pascabencana Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2042–2047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12640>
- Utomo, E. S. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Yunus, M., Zulham, T., Maulana, H., Syahrial, K., & Mazum, N. D. U. (2025). *Pemikiran dan Tradisi Perekonomian di Indonesia*. USK Press.
- Zakariya, A. F., Nurhayati, R. D., & Rosida, I. N. (2025). Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqoshid Syariah: The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective of Maqoshid Sharia. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6767>